

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu pilar sentral kemajuan bangsa, kemajuan peradaban, dan kehormatan suatu bangsa dapat dilihat dari lembaga-lembaga pendidikannya yang bermutu, yang berhasil menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia masa depan yang berilmu, berbudaya dan bermoralitas tinggi. Islam sendiri mewajibkan umatnya agar menuntut ilmu dalam rangka meningkatkan derajat kehidupan.

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada Bab II Pasal 3 memiliki fungsi dan tujuan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹

Sejak digulirkannya reformasi dan telah diundangkannya UU Otonomi Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (kini disempurnakan menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004), telah mengubah dari segala yang bersifat sentralisasi (top down) menjadi

¹ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional 2003*, (Jakarta: Cemerlang, 2003), h. 7

desentralisasi. Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, demi membangun daerahnya masing-masing, dengan mengakomodasi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya. Berlakunya Undang-undang Otonomi Daerah tersebut, tentunya telah memberikan angin segar bagi daerah, karena daerah diberikan kekuasaan dan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur sendiri berbagai kewenangan yang diberikan, termasuk di dalamnya aspek pendidikan.²

Dalam ajaran Islam sangat mengutamakan pendidikan, Allah lebih menyukai dan meninggikan derajat seseorang yang berpendidikan atau berilmu pengetahuan tinggi, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan.

Upaya Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka digalakkan suatu usaha nyata, dalam hal ini yang tepat adalah pendidikan. Baik yang bersifat formal maupun non formal yang proses pelaksanaannya merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Keberadaan hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) di lembaga pendidikan sangat penting, sebab ia merupakan bagian dari kegiatan pendidikan dan fungsinya memperlancar semua kegiatan atau aktivitas pendidikan, tanpa adanya hubungan sekolah dengan masyarakat rasanya sulit sekali bagi lembaga

² Hasbullah, *Otonomi Pendidikan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 65-66

pendidikan untuk dapat berjalan dengan maju dan lancar sesuai dengan tujuan pendidikan.

Kindred Leslie dalam bukunya *School Public Relations*, mengemukakan:

Hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) adalah suatu komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan maksud meningkatkan pengertian warga masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama para anggota masyarakat dalam rangka usaha memperbaiki sekolah.³

Dari pengertian di atas, pendidikan merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan menggunakan segala fasilitas yang tersedia agar tujuan yang ditetapkan dapat dicapai. Dengan kata lain terjalinnya kerja sama antar sekelompok orang lebih mudah dalam pendidikan yang diharapkan, sebagaimana Firman Allah dalam Surah Al- Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dalam ayat diatas terkandung adanya suatu perintah untuk melakukan pertolongan dalam bentuk kerjasama. Seperti diketahui sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan interaksi dan komunikasi dengan manusia lainnya agar fitrahnya sebagai makhluk sosial dapat berkembang dan tersalurkan.

³Piet A. Sehartian, *Dimensi-Dimensi Administrasi Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), h. 233-234

Hubungan antara sekolah dengan masyarakat (Humas) di sekitarnya sangat penting. Di satu sisi sekolah memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan dukungan masyarakat dalam melaksanakan program tersebut. Di lain pihak, masyarakat memerlukan jasa sekolah untuk mendapatkan program-program pendidikan sesuai dengan yang diinginkan.

Hubungan dengan masyarakat (Humas) akan tumbuh jika masyarakat juga merasakan manfaat dan keikutsertaannya dalam program sekolah. Manfaat dapat di artikan luas, termasuk rasa diperhatikan dan rasa puas karena dapat menyumbangkan kemampuannya bagi kepentingan sekolah.⁴

Dengan demikian, maka hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) merupakan proses dengan masyarakat merupakan proses yang direncanakan dan sungguh-sungguh serta pembinaannya yang dilakukan secara kontinyu untuk mendapat simpati dari masyarakat, sehingga kegiatan operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien.

Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat. Seruan ini mengisyaratkan bahwa lembaga pendidikan hendaknya tidak menutup diri, melainkan selalu mengadakan kontak hubungan dengan dunia luar yaitu orang tua dan masyarakat sekitar sebagai penanggung jawab pendidikan. Dengan kedua kelompok inilah sekolah dapat bekerja sama mengatasi problem-problem pendidikan yang muncul dan memajukannya.

⁴Ary A. Gunawan, *Administrasi Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 186

Untuk itulah, dalam rangka tercapainya tujuan dalam menjalin hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan masyarakat (Humas) diperlukan adanya perbaikan dan strategi yang baik pula dari pihak-pihak yang terkait.

Salah satu lembaga pendidikan di daerah Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala adalah Madrasah Aliyah Nurul Khair. Kaitannya dengan masalah yang akan diteliti, bahwa Madrasah Aliyah Nurul Khair, adalah suatu wadah untuk mengelola semua partisipasi masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan pendidikan akan tetapi sebagian masyarakat disana masih kurang mendukung dalam kegiatan tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan penulis pada Madrasah Aliyah Nurul Khair di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala melalui wawancara dengan Kepala Madrasah, diperoleh informasi bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) telah terlaksana. Akan tetapi masih belum dapat berjalan sebagai mana mestinya karena masyarakat masih kurang mendukung perkembangan lembaga pendidikan tersebut di karenakan masyarakat kurang merasa memiliki lembaga pendidikan tersebut. Setelah melihat keadaan tersebut maka penulis bermaksud untuk mengangkat judul .

MANAJEMEN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MENGEBANGKAN LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA MADRASAH
ALYAH NURUL KHAIR DI KECAMATAN MEKARSARI KABUPATEN
BARITO KUALA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan swasta Madrasah Aliyah Nurul Khair di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Swasta Madrasah Aliyah Nurul Khair Di Kecamatan Mekarsari

C. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul di atas yaitu:

1. Melihat Realita Yang Ada Bahawa Masyarakat Kurang Berminat Dan Kurang Mendukung Terhadap Perkembangan Lembaga Pendidikan Swasta.
2. Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan Swasta Adalah Sebagai Wadah Atau Tempat Penampung Semua Aspirasi Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan.
3. Kemajuan suatu lembaga pendidikan tidak lepas dari peran serta masyarakat , baik orang tua peserta didik, penduduk yang ada disekitar madrasah dan para pengusaha yang tinggal di sekitar lembaga pendidikan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan manajemen partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta Madrasah Aliyah Nurul Khair di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Partisipasi Masyarakat Dalam Lembaga Pendidikan Swasta Madrasah Aliyah Nurul Khair di Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat berguna:

1. Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang manajemen partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta.
2. Untuk bahan informasi bagi madrasah, guru, orang tua dan masyarakat tentang manajemen partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta.
3. Untuk bahan masukan bagi lembaga pendidikan swasta dan masyarakat.
4. Untuk memperkaya pengetahuan penulis dan menambah khazanah kepustakaan Fakultas Tarbiyah khususnya dan IAIN Antasari Banjarmasin pada umumnya.

F. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara Teoritis

Kegunaan penelitian penulis secara teoritis adalah melalui penelitian ini diharapkan menambah khazanah perbendaharaan pengetahuan khususnya dalam penelitian ini, dan sebagai bahan bacaan dalam memperkaya khazanah perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin. Serta sebagai bahan masukan dan informasi bagi lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Nurul Khair Kecamatan Mekarsari. Bahwa pelaksanaan manajemen partisipasi masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan swasta Madrasah Aliyah Nurul Kahir di kecamatan mekarsari. Hubungan sekolah dengan masyarakat (Humas) yang baik dapat memperlancar proses belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Kegunaan secara Praktis

Kegunaan penelitian penulis secara praktis yaitu saran penulis untuk mengaplikasikan pengetahuan yang di dapat baik dari bangku sekolah-kuliah maupun pengalaman di luar kuliah. Serta sebagai bahan informasi bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang serupa untuk mengadakan penelitian lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam pengertian judul diatas, penulis akan memberikan defisi operasional sebagai berikut:

1. Manajemen Partisipasi

Manajemen, yang dikaksud dalam penelitian ini adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara-cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan kaontroling dengan kegiatan manajemen, partisipasi masyarakat dalam memebangun laembaga pendidikan tersebut.

Jadi yang di maksud Manajemen Partisipasi menurut penulis ialah bagaimana sekolah bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan agar bisa berperan aktif dalam pengebangan pendidikan, seperti ikut serta dalam penggalangan dana, dan pemikiran dalam memenjukan pendidikan, dan partisipasi moral

2. Pengembangan Lembaga Pendidikan

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Lembaga merupakan seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang. Pendidikan memiliki dua istilah penting yaitu: “ pedagogi” dan “ pedagogik”. Pedagogi yang berarti pendidikan, sedangkan pedagogik atau ilmu pendidikan berarti ilmu yang menyelidiki atau ilmu yang merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik.

Sedangkan yang di maksud Pengembanga Lembaga Pendidikan menurut penulis usaha untuk memajukan lembaga pendidikan baik dari segi sarana dan

prasarana dan dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan.

3. Swasta

Swasta dalam ekonomi suatu negara terdiri dari segala bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah. Baik organisasi nirlaba maupun laba dapat termasuk swasta, antara lain perusahaan, korporasi, bank, dan organisasi non-pemerintah lainnya, termasuk juga karyawan yang tidak bekerja untuk pemerintah. Dalam sektor ini, faktor-faktor produksi dimiliki oleh individual atau pribadi.

Sedangkan yang di maksud oleh penulis adalah suatu lembaga yang terdiri dari segala bidang yang tidak di jalankan oleh pemerintah dan didirikan oleh masyarakat baik atas asas gontongroyong atau pribadi.

Jadi manajemen partisipasi masyarakat dalam pengembangan lembaga pendidikan swasta bagaimana madrasah bisa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pendidikan baik dalam pendanaan dan sumbangan pemikiran dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kemajuan lembaga pendidikan swasta sangat berhubungan erat dengan peran serta masyarakat dan orang tua peserta didik. Akan tetapi motivasi dan dukungan Kepala Madrasah sangat berperan dalam merekrut masyarakat untuk berperan serta dalam kemajuan pendidikan. Dukungan dan peran serta masyarakat terhadap madrasah merupakan suatu komunikasi antara madrasah dengan masyarakat, dengan maksud memberi pengertian kepada masyarakat tentang kebutuhan dan praktek pendidikan serta mendorong minat dan kerja sama para anggota masyarakat dalam rangka usaha

memperbaiki madrasah dan pengambilan keputusan yang akan di laksanakan demi kemajuan madrasah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam karya tulis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisikan tentang: Latar belakang masalah, rumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, kegunaan penulisan, definisi oprasional, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas tentang landasan teori: Urgensi manajemen pada organisasi pendidikan, konsep manajemen dalam islam, konsep partisipasi masyarakat dalam Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, pendidikan dalam islam, dan manajemen partisipasi masyarakat dalam pendidikan islam.

BAB III : Metode penelitian yang memuat: Jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, dan prosedur penelitian.

BAB IV : Laporan dan hasil penelitian: Gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

BAB V : Penutup, yang merupakan pembahasan akhir dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian ini, dan saran-saran.